

KONSEP *NEW PUBLIC MANAGEMENT* DALAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI BALI

I Putu Angga Suryawan¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, Gede Indra Pramana³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : anggasuryawan46@gmail.com¹⁾, erviantono2@yahoo.com²⁾, indraprama@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

One of the factors that influence good and bad governance lies in the bureaucracy. whether the bureaucracy is good or bad depends on the quality of the human resources of its apparatus, namely the state civil apparatus. the concept of New Public Management has begun to be implemented in Indonesia, one of which is Bali. This study uses a descriptive qualitative research technique by collecting various existing data. The implementation of the New Public Management is in the form of bureaucratic reform of the Bali provincial government with various new programs that are more modern, effective and efficient. The Provincial Government of Bali is of the opinion that the increase in the level of success in implementing bureaucratic reform in 2021 illustrates the success of the Provincial Government of Bali in implementing New Public Management in the form of Bureaucratic Reform.

Keywords : *New public management, bureaucratic reform, Pemprov Bali*

1. PENDAHULUAN

New Public Management atau disingkat NPM adalah sebuah pola baru dalam birokrasi yang muncul di sekitar tahun 1990 (Hood, 1991). Model birokrasi tersebut tercipta dari formulasi kritikan birokrasi instansi negara maupun organisasi sektor publik yang dinilai belum bisa berjalan secara produktif dan efisien. Kurangnya inovasi dan kualitas yang rendah juga menghambat dan menyebabkan organisasi sektor publik kerap merugi.

Manajemen di bidang sektor publik yang berpusat pada kinerja daripada kebijakan adalah bentuk dari Manajemen Publik Baru. Konsep manajemen publik baru pada awalnya berkembang di negara maju seperti

Eropa dan Amerika. Akan tetapi dewasa ini negara berkembang juga ikut mengimplementasi model manajemen publik baru tersebut salah satunya Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sedang dalam tahap memulai menerapkan model manajemen publik baru, namun hal ini tidak berjalan tanpa berbagai tantangan. Manajemen Publik Baru telah diimplementasi pada organisasi sektor publik sejak tahun 1999 melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Indonesia.

Untuk mencegah energi yang tidak diperlukan dari organisasi menyebar, ada

teori tentang penetapan tujuan yang dapat dipercaya dengan tujuan yang jelas dan hasil yang dapat diukur. Dengan menunjukkan mengenai tujuan organisasi di masa yang akan datang secara detail, ambiguitas pegawai akan hilang dengan sendirinya. Dengan demikian, karyawan dapat berkonsentrasi pada menyelesaikan tugas-tugas mereka secara efisien dan efektif. Penerapan Insentif juga dapat mendorong kinerja yang lebih baik (Bonner dan Sprinkle, 2002).

Pada penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 lalu, pemerintah Provinsi Bali mendapatkan predikat sangat baik dalam menjalankan tugas birokrasinya. Dengan pencapaian ini, Bali menjadi provinsi yang berhasil meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi dari akreditasi baik di tahun 2020 menjadi sangat baik di tahun berikutnya 2021.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep *New Publik Management*

Ketika sektor publik menjadi lebih lemah dan lebih lemah daripada sektor swasta, reformasi pengelolaan sektor publik muncul. Peralihan dari administrasi konvensional ke manajemen publik baru digambarkan dengan memfokuskan pada akuntabilitas beserta kinerja pengelolaan birokrasi yang sebelumnya diimplementasi sektor swasta kemudian diterapkan oleh sektor publik.

Menurut konsep *New Public Management*, metode manajemen sektor swasta dirasa lebih unggul daripada metode manajemen yang ada pada sektor publik. Dengan begitu, dalam meningkatkan kinerja

sektor publik, teknik dan karakteristik manajemen yang telah diterapkan di sektor swasta hendak diadaptasi ke dalam sektor publik, sebagai contoh mekanisme pasar, persaingan tender, dan privatisasi perusahaan harus lebih diperhatikan praktiknya. Menurut Pecar (2002), penerapan NPM dianggap sebagai cara untuk meningkatkan demokrasi melalui beberapa kegiatan seperti : reformasi manajemen, depolitisasi relasi kuasa, dan merombak wewenang yang terpusat.

Rethinking government, yang kemudian diikuti oleh *reinventing government*, adalah titik awal proses perubahan. *Reinventing government* yaitu merombak ulang tatanan birokrasi yang sudah ada serta merubah peran pemerintah terhadap masyarakat (Mardiasmo, Osborne and Gaebler, 1993; dan Hughes, 1998). Perubahan ini terjadi dengan beberapa kegiatan seperti : penyederhanaan sistem birokrasi, sistem kontrak yang diperjelas, dan perubahan administrasi publik ke manajemen publik baru yang telah terjadi di seluruh dunia.

Menurut Pecar (2002), masalah tersebut terutama berasal dari cara berpikir birokrat konvensional, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, dan peraturan perundang-undangan yang membatasi fleksibilitas dalam pengambilan keputusan.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang melibatkan pengamatan, wawancara, atau pemeriksaan dokumen atau data sebelumnya. Untuk memberikan gambaran tentang penyajian laporan, jenis penyediaan hasil dari laporan

penelitian ini bersifat analisis penelitian yang berisi kutipan data dari beberapa sumber secara deskriptif.

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi yang menggambarkan fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Fenomena tersebut dapat terjadi secara natural maupun dengan adanya campur tangan manusia. Metode ini disebut analisis deskriptif karena menganalisa bentuk aktivitas, karakter, hubungan, perubahan, perbedaan maupun kesamaan dalam subjek yang diteliti secara menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu melihat data mengenai keadaan atau fenomena sosial yang telah berkembang di masyarakat. Dengan begitu penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai subyek yang sedang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Indra dalam sebuah wawancara menjelaskan Reformasi Birokrasi dan SAKIP selama ini telah beriringan dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka. Visi tersebut memiliki tujuan mengembangkan sistem birokrasi pemerintahan daerah menjadi kearah yang lebih bersih, transparan efektif dan efisien.

Menurut Dewa Indra, Pemprov Bali telah beralih ke media digital dalam berbagai aspek sistem layanan publiknya untuk melaksanakan misi tersebut. Seperti contoh mereka telah menggunakan e-kantor, yang

memungkinkan tanda tangan elektronik di kegiatan surat menyurat.

Selain itu, Biro Hukum Setda provinsi Bali juga mengadaptasi sistem elektronik dalam perancangan produk hukum pemerintah dalam skala kabupaten maupun kota. Pemprov Bali telah menerapkan sistem birokrasi secara daring untuk kebutuhan layanan seperti perijinan, pengadaan barang, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih mudah dan efisien. Setelah itu Pemprov Bali melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan arahan serta kebijakan Menteri Dalam Negeri beriringan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Birokrasi.

Reformasi Birokrasi disini juga memiliki contoh road map untuk instansi Kementerian Hukum dan HAM wilayah Bali berisikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari rentang waktu 2020-2024 melalui beberapa program yang sudah mulai dijalankan. Program tersebut dimulai dengan manajemen perubahan yaitu penguatan kebijakan penerapan system nilai dan integritas birokrasi secara internal guna meminimalisir risiko kegagalan yang kemungkinan disebabkan oleh resistensi terhadap perubahan.

Kemudian dilanjutkan dengan program penataan perundang-undangan guna mewujudkan kebijakan yang sesuai demi tujuan dan kepentingan negara. Hal ini yang kemudian memicu efektivitas dalam pengelolaan peraturan sektor publik dan

agar tercapainya regulasi yang kondusif, tertib, efektif, dan efisien.

Berikutnya ada upaya tata kelola organisasi untuk lebih tertata. *Good government* menjadi tujuan akhir dari upaya reformasi birokrasi dan kelembagaan yang baik dengan menjadi organisasi dengan fungsi dan takaran yang tepat. Pelaksanaan manajemen publik baru harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, sistem yang terus meningkat, transparan, efektif, efisien, dan tentunya berbasis *e-government*.

Penataan system manajemen Sumber daya manusia (SDM) aparatur juga dilakukan dengan meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing. SDM aparatur diharapkan memiliki karakter berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi. Peningkatan pengawasan juga dilakukan untuk mengawasi aktifitas penggunaan uang negara oleh berbagai instansi pemerintah. Serta meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan agar tercapainya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme dan akuntabel.

Meskipun implementasi NPM tidak tanpa hambatan dan masalah, Manajemen Publik Baru bisa meningkatkan dan membantu kinerja sektor publik dengan cara pengukuran ekonomi, efektivitas dan efisiensi yang ada. Masalah-masalah yang dilalui reformasi birokrasi tersebut adalah mentalitas aktor yang menjalankan birokrasi tradisional, keahlian dan pengetahuan yang belum tercapai, dan regulasi yang

menghambat pengambilan keputusan (Pecar, 2002).

Pemprov Bali pendapat kenaikan predikat tingkat keberhasilan dalam mengimplementasi reformasi birokrasi pada tahun 2021 yang dimana pada tahun 2020 Pemprov Bali memperoleh nilai B (60-70 baik) dan di tahun selanjutnya memperoleh nilai BB (70-80 sangat baik). Predikat ini mencerminkan keberhasilan dari implementasi beberapa program New Public Management melalui reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2020 lalu.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep dari New Public Management sudah mulai di implementasi di Indonesia salah satunya adalah Bali. Implementasi dari manajemen publik baru tersebut adalah dalam bentuk reformasi birokrasi pemerintah provinsi Bali dengan berbagai program baru yang lebih modern dan disesuaikan dengan fungsi untuk menciptakan system birokrasi yang lebih mengedepankan *e-government* secara efisien dan efektif.

Konsep tersebut sudah mulai membuah hasil seperti terdapat nya gambaran bahwa AKIP sangat baik pada dua atau tiga unit kerja, baik unit kerja utama maupun pendukung. Memiliki sistem manajemen kinerja yang stabil dan berbasis TI, penggunaan anggaran yang efisien untuk mencapai kinerja, dan pengukuran kinerja telah mencapai tingkat eselon 3 atau koordinator adalah semua tanda-tanda akuntabilitas yang sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, Sri. (2020). Penerapan Model New Public Management (NPM) Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, B. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana.
- Taufiqurokhman. 2016. Manajemen strategic. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Website Kementrian hukum dan ham wilayah Bali. Roadmap reformasi birokrasi Bali. Diakses melalui <https://bali.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/reformasi-birokrasi/3567-road-map-reformasi-birokrasi-tahun-2020-2024>. Tanggal 4 agustus 2022.
- Website Pemprov Bali. (2022). Naik Tingkat, Pemprov Bali Raih Predikat BB dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Diakses melalui <https://www.baliprov.go.id/web/naik-tingkat-pemprov-bali-raih-predikat-bb-dalam-pelaksanaan-reformasi-birokrasi/>. Tanggal 5 agustus 2022.